

Kebijakan Kolonial Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Komoditas Lada dan Kopi di Lampung awal Abad ke-19

Ahmad Benny Syahputra¹; Sudrajat²

Universitas Negeri Yogyakarta,
Email: Ahmadbenny65@gmail.com

Abstrak

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia, terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dengan batas administratif sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur dengan Laut Jawa sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebagai salah wilayah yang ada di Indonesia, Lampung memiliki keunikan sejarahnya tersendiri. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengkaji Kebijakan Pemerintahan Kolonial Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Komoditas Perdagangan Lada dan Kopi di Lampung Abad ke-19. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode historis dengan pendekatan studi pustaka atau *literature review* melalui berbagai sumber, dimana penulis dapat mengkaji secara mendalam atas penelitian yang dibuat dan posisi peneliti juga berada dalam posisi tertinggi sebagai penganalisa. Adapun lima tahap penelitian historis menurut Kuntowijoyo yakni, pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Hasil dari penulisan artikel ini adalah dinamika pertumbuhan komoditas Lada dan Kopi di Lampung tidak terlepas dari adanya berbagai pihak diantaranya terdapat kebijakan dari Pemerintahan Kolonial Belanda. Faktor penyakit tanaman, konstelasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, demografi yang rendah, dan infrastruktur masih tradisional turut mempengaruhi hasil dari produksi Lada dan Kopi pada masa Kolonial Belanda.

Kata kunci: Lampung, Sejarah, Kolonial, Perdagangan.

Abstract

Lampung is one of the provinces in Indonesia, located at the southern tip of Sumatra Island with an administrative boundary to the north with the Province of South Sumatra, to the east by the Java Sea, to the south by the Sunda Strait, and to the west by the Indonesian Ocean. As one of the regions in Indonesia, Lampung has its own unique history. In this paper, the writer is interested in studying the Dutch Colonial Government Policy and Its Effect on the Pepper and Coffee Trading Commodities in 19th Century Lampung. The method used in writing this scientific article is the historical method with a literature review approach or literature review through various sources, where the author can examine in depth the research made and the position of the researcher is also in the highest position as an analyst. According to Kuntowijoyo, the five stages of historical research are topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historical writing. The result of writing this article is that the dynamics of the growth of Pepper and Coffee commodities in Lampung can not be separated from the existence of various parties including the policies of the Dutch Colonial Government. Plant disease factors, unstable political and economic constellations, low demographics, and traditional infrastructure also influence the result of the production of Pepper and Coffee during the Dutch Colonial period

Keywords: Lampung, History, Colonial, Trade.

A. Pendahuluan

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia, terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dengan batas administratif sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur dengan Laut Jawa sebelah selatan/tenggara dengan Selat Sunda, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara tradisional masyarakat Lampung tidak terbatas pada masyarakat Provinsi Lampung saja, tetapi juga mencakup Danau Ranau di Muaradua di Komering dan Kayu Agung di Sumatera Selatan (Hisyam 2012).

Secara historis, letak Lampung yang strategis merupakan salah satu wilayah dibawah hegemoni Kesultanan Banten, dimana kesultanan Banten memiliki kontrol penuh atas hak perdagangan dan hak atas kekayaan alam, termasuk Lada sebagai salah satu lumbung surplus bagi Kesultanan Banten (Imadudin 2016). Namun, ketika masa pemerintahan Arya Adi Sendika berkuasa sebagai Sultan, Kesultanan Banten tidak memiliki kekuasaan secara *de jure* terhadap wilayah Lampung, hal tersebut dikarenakan pada pemerintahan Arya Adi Sendika, Kesultanan Banten dijadikan sebagai jaminan pinjaman dari VOC. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, maka wilayah Lampung secara *de jure* dikuasai oleh VOC pada tahun 1711 VOC (Bukri et al. 1998).

Komoditas lada yang menjadi primadona sejak kesultanan Banten VOC pada masa kejayaannya, merupakan bahan rempah yang sangat diminati oleh banyak orang yang berasal dari bangsa Arab, Timur Asing, hingga Eropa sebagai penambah citarasa masakan. Perdagangan lada yang dimonopoli pada masa VOC kemudian mengalami kebangkrutan setelah VOC bubar, hingga pemerintah Hindia Belanda mengambil alih penguasaan lada di Lampung. Setelah bubarnya VOC kekuasaan Belanda di Lampung berpusat di Tulang Bawang, yakni pada masa tanam paksa (1830-1870), kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda ialah memaksa petani lada menjual lada kepada pemerintah melalui tangan kepala-kepala marga yang pada saat itu adalah perpanjangan tangan dari Belanda (Imadudin 2016).

Mengenai tanaman kopi sendiri, Menurut J.W.J. Wellan (dalam Imadudin, 2016) mengungkapkan bahwa budidaya tanaman kopi sebagai tanaman wajib bagi masyarakat

Lampung berlangsung pada pada dekade pertama abad ke-20. Pada masa ini, sebagai upaya pemerintah Belanda dalam budidaya hasil pertanian, Pemerintah memberlakukan sebuah sistem yang dimakan sistem *verlag*, yaitu sebuah sistem dimana pemilik modal dapat meminjam modal dari pedagang untuk membuka lahan.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini, menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Adapun tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah (Kuntowijoyo 2018). Sedangkan, metode penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai, serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan atau *study literatur review* posisi peneliti dalam penulisan artikel menempati posisi tertinggi dalam memberikan evidensi tentang sebuah permasalahan (Zed 2004).

C. Tinjauan Penelitian

Berbagai kajian terdahulu menyebut adanya pengaruh pemerintahan Kolonial Belanda terhadap Lampung, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gregorius Andika Ariwibowo, 2018 yang berjudul *Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan di Karesidenan Lampung pada Periode 1856 hingga 1930*, kemudian Iim Imanudin, 2016; mengenai *Perdagangan Lada di Lampung dalam Tiga Masa (1653-1930*, Laelatul Masruroh, 2015 mengenai *perkebunan dan perdagangan lada di lampung tahun 1816-1942*. Minimnya kajian sejarah, khususnya dalam kajian sejarah mengenai Lampung menjadi pendorong utama bagi penulisan kajian ini, dan topik ini menarik untuk dikaji dikarenakan Lampung merupakan salah satu wilayah di sumatera yang pada masa kolonial dijadikan sebagai salah satu wilayah perkebunan kopi dan lada. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika perkembangan kebijakan pemerintah Kolonial Belanda khususnya terhadap perkembangan komoditas lada dan kopi di Lampung.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Lampung masa pemerintah Kolonial Belanda

a. Lampung Masa VOC

Lampung adalah daerah penghasil rempah-rempah, dan merupakan salah satu wilayah dibawah hegemoni Kesultanan Banten. Letaknya yang strategis dan penghasil rempah-rempah utama ada saat itu, menyebabkan terjadinya persaingan antara Kesultanan Banten dan Palembang, lalu ada aktor non-negara seperti para bajak laut dan perampok, serta perusahaan dagang negara antara Inggris dan Belanda juga memainkan taktiknya dalam dinamika sejarah daerah Lampung. Ota Atsushi (dalam Kristian, 2019) menyimpulkan bahwa produk paling berharga seperti lada, rotan, damar, emas dan lainnya menjadi alasan berbagai kelompok luar datang ke Lampung di sepanjang abad ke-18. Namun, sejak sekitar abad ke-18 Banten sudah tidak memiliki kekuasaan secara *de facto* terhadap wilayah Lampung, hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Arya Adi Sendika, wilayah Lampung secara *de jure* diberikan kepada VOC pada tahun 1711 (Sayuti, Husin; Gunawan 2012).

Dalam hal ini, secara otomatis daerah Lampung turut dibawah otoritas VOC. Tidak hanya kekuasaan yang dijalankan oleh VOC di Banten, di daerah Lampung sebagaimana Ketika Banten Jatuh ke bawah pengaruh VOC, disusul pula daerah-daerah lain, masyarakat di bawah kekuasaan Banten banyak yang kemudian menjadi bajak laut. Akibatnya perdagangan menjadi terhalang dan banyak sekali perampok-perampok laut dengan bantuan Inggris yang turut serta dalam perebutan hegemoni di daerah Lampung, akibatnya daerah Lampung kemudian dibiarkan dalam mengurus pemerintahannya (Bukri et al. 1998).

Akibat dari melemahnya pemerintah pusat di Banten, ditambah dengan maraknya perompakan dan perampokan, jumlah pesaing perdagangan wilayah VOC yang semakin tidak terkendali meningkat, ditambah dengan wabah penyakit cacar dan kemarau yang berkepanjangan, hal tersebut kemudian mengakibatkan beberapa daerah Lampung terkena dampak penurunan produksi, yang juga berarti jumlah lada yang dikirim ke Banten pada tahun 1770 berkurang (Kristian 2019). Upaya-

upaya untuk menggiatkan kembali produksi dan perdagangan lada di Lampung oleh VOC nyatanya tidak berhasil, hingga akhirnya VOC lepas tangan atas keadaan tersebut. VOC secara resmi dibubarkan pada 1799 dan Kesultanan Banten dihapuskan pada 1808, melalui keputusan 22 November 1808 oleh Daendels, sehingga otomatis Lampung dibawah hegemoni langsung pemerintah Belanda di Batavia (Van Der Kemp 1899).

b. Masa pemerintahan kolonial

Imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di Indonesia memberikan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan. Ketika tahun 1807 ketika pemerintah Belanda memproklamkan bahwa Seluruh Hindia Belanda (Nusantara) menjadi bagian dari kerajaan Belanda dan saat itu juga Gubernur Jenderal H.W. Daendels diangkat sebagai wakil kerajaan yang berkedudukan di Batavia. Dalam hal ini penaklukan wilayah yang dilakukan Belanda di Indonesia, khususnya di Lampung urgensinya adalah tidak hanya sebagai kepentingan ekonomi melainkan juga sebagai kepentingan politik. Kekuasaan awal Belanda di Lampung banyak menimbulkan perlawanan-perlawanan untuk menolak kedatangan Belanda. Namun seiring perjalanan waktu perlawanan dapat diredam yang kemudian Belanda mulai menata pemerintahannya di Lampung sebagai sebuah *Afdeling* yang dikepalai oleh residen (Rifqi; 2020).

Kepentingan ekonomi menonjol dalam upaya Belanda untuk mengkonsolidasikan pemerintahan di Lampung, melibatkan delapan ekspedisi antara 1805-1856. Pemerintah Belanda pada saat itu, beranggapan bahwa perekonomian Lampung yang sedang berantakan pada saat itu dapat dikembalikan sebagai salah satu lumbung lada ke masa jaya. Selain itu, Lampung menempati posisi strategis yakni, sebagai salah satu dari dua pintu gerbang utama ke Timur Jauh dari Samudera Hindia dan juga merupakan penghubung antar pulau perdagangan (Kingston 1990).

Kehadiran Belanda di Lampung memberikan dampak terjadinya *Culture Stelsel* di wilayah tersebut. Ketertarikan Belanda terhadap Lampung disebabkan karena wilayah Lampung yang luas dan subur sebagai penghasil ekonomi. Kondisi ini menimbulkan adanya praktik perburuan atas implementasi dari pemberlakuan *Cultur Stelsel* (Bukri et al.

1998). Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Korelasi dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda selanjutnya menimbulkan reaksi berlakunya politik etis (1899) sebagai tindak lanjut atas pembebasan dari *Culture Stelsel*. Lebih lanjut Karsiwan (2013) mengungkapkan bahwa konsep pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan hegemoninya adalah dengan cara mendirikan kekuasaan di atas kekuasaan negara lain, baik melalui perjanjian, penaklukan, dan serta tak jarang menggunakan cara peperangan. Dengan tujuan untuk menguasai wilayah yang didudukinya, beserta segala potensi yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah kolonial dalam hal ini merupakan suatu perpanjangan tangan negara induk untuk mengatur, mengontrol, dan menguasai seluruh sumber daya negara jajahan (Karsiwan 2020).

2. Kebijakan dan pengaruh politik kolonial

a. Politik etis sebagai Kebijakan politik kolonial

Kebijakan kolonial Hindia Belanda di Lampung dalam bidang politik secara eksplisit terlihat ketika pelaksanaan politik etis sebagai reaksi dari politik balas budi untuk menebus kesalahan pada peristiwa *Culture Stelsel*. Unsur dari politik etis adalah Edukasi, Irigasi, dan Transmigrasi. Wujud dari pelaksanaan politik etis adalah sebagai balas budi dan dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat pribumi, namun kenyataannya tidak jauh berbeda ketika pelaksanaan *Culture Stelsel*. Pemberlakuan politik etis, khususnya di Lampung salah satunya adalah transmigrasi dan irigasi. Salah satu program dalam politik etis yaitu kolonisasi, dengan membuat perubahan tata kependudukan bagi daerah di ujung selatan pulau sumatera, yaitu Lampung diwujudkan melalui Transmigrasi pada tahun 1905 (Budianto 2020). Faktor yang menyebabkan suatu daerah menjadi tujuan pemindahan penduduk adalah dikarenakan jumlah populasi yang menempati daerah tersebut masih jarang. Selain itu keterbukaan masyarakat akan penerimaan orang luar di wilayahnya menjadi sebuah pilihan seperti yang terjadi di Lampung. Dalam hal ini, pemerintah memanfaatkan program tersebut, sebagai sumber penyedia tenaga kerja bagi konsep ekonomi yang digagas oleh pemerintah kolonial (Kristian 2019).

Secara historis, pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa untuk pertama kalinya dilakukan di Lampung, tepatnya di Gedong Tataan (kini bagian dari wilayah Kabupaten Pringsewu). Wilayah ini merupakan lokasi pertama pemindahan penduduk dengan alokasi pemindahan sebanyak 155 kepala keluarga yang berasal dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. *Kolonisatieproof* atau kebijakan kolonisasi ini, dilaksanakan oleh suatu komisi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial yaitu *Central Commissie Voor Emigratie en Kolonisatie Van Imheemsen* (Komisi Pusat Emigran dan Kolonisasi Pribumi). Dampak yang ditimbulkan dari program transmigrasi ini di wilayah Gedong Tataan adalah kemajuan sosial yang khususnya terwujud dalam kehidupan sosial masyarakatnya yang rukun dan terintegrasi satu sama lain. Gedong Tataan juga semakin pesat menjadi sebuah kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan warganya. Selain itu bercampurnya budaya dari berbagai daerah turut menghiasi kehidupan di wilayah ini akibatnya dapat dikatakan bahwa di Gedong Tataan terjadi multikultural yang terus berlanjut hingga sampai saat ini (Halwi Dahlan 2014).

Sebagai upaya perluasan wilayah dan pelaksanaan transmigrasi di Lampung, kebijakan politik etis di Lampung juga menyentuh ranah pembangunan irigasi seperti halnya di Pulau Jawa. Diantaranya adalah pembangunan Bendungan Argoguruh pada tahun 1935 di Tegineneng. Bendungan Argoguruh merupakan bangunan bendungan yang berfungsi sebagai bangunan resapan air yang membendung Sungai Way Sekampung untuk mengalirkan lahan pertanian yang dibutuhkan oleh penduduk yang bermigrasi dari Jawa ke Lampung karena sebagian besar adalah petani (Amboro 2021).

b. Perlawanan di daerah Lampung

Abad ke-19 ditandai dengan banyaknya perlawanan rakyat yang timbul pada beberapa daerah, tidak terkecuali di wilayah Lampung. Tercatat bahwa Di daerah Lampung terdapat pula perlawanan yang dimotori oleh penguasa lokal, diantaranya Raden Inten I yang bergelar *Dalim Kusuma Ratu VI*. Sebagaimana tertuang dalam prasasti Kuripan mengenai administratif lampung terhadap Banten, Penduduk Lampung masih mengakui kepemimpinan lokal. Raden Inten I diakui pangkatnya sebagai ratu (*prins regent*) dan *kurnel* di negara ratu (Kalianda) oleh Belanda (Bukri et al. 1998).

Keadaan berubah, ketika pada tahun 1811 pulau Jawa diserang oleh pasukan Inggris dan kemudian Indonesia menjadi jajahan Inggris, secara *de jure* Daerah Lampung dengan sendirinya dipandang sebagai daerah jajahan Inggris melalui Residen yang berkedudukan di Banten, sebagaimana disebutkan dalam ketetapan dari Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles tertanggal 26 Pebrurari 1812 yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin rakyat di Lampung. Bahkan dalam laporan Komite Perancang Sarana Sumberdaya Lampung pada tahun 1841 menyatakan bahwa keluarga Raden Inten bertanggung jawab atas “semua kejahatan” yang melanda di Lampung abad ini dan penyebab utama yang mencegah kedamaian agar tidak sepenuhnya pulih (Van Der Kemp 1899).

Pada tahun 1816, sesudah perang Eropa selesai, melalui surat perjanjian antara pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda, maka wilayah yang tadinya masuk kedalam jajahan Inggris kemudian dikembalikan ke tangan Belanda. Namun, setelah pengalihan kekuasaan ke tangan Hindia Belanda tahun 1816, kekuasaan Radin Inten tidak diakui lagi. Pada tahun 1817 dibuat kesepakatan antara Asisten Residen *Krusemen* dengan Raden Inten I yang isinya sebagai berikut:

- 1) Raden Inten I bersedia meninggalkan jalan kekerasan dan membantu pemerintah.
- 2) Radin Inten I akan diakui kedudukannya sebagaimana halnya pada masa Daendels.
- 3) Radin Inten I akan mendapat pensiun f 1200 setahun dan saudara-saudaranya mendapat pensiun f 600 setahun (Bukri et al. 1998).

Dalam kelangsungan politik kolonialisme, Belanda terus merangsek lebih jauh dalam politik internal dengan melakukan kebijakan pengakuan, mendukung, dan menguatkan lembaga pemerintahan marga dengan jalan mengubah pola melalui pengangkatan pejabat pasirah yang dipilih oleh para elit marga semacam dewan perwakilan yang merepresentasi kelompok adat yang disebut penyimbang adat, diberikan ketetapan pengabsahan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh pemerintah kolonial (Kristian 2019).

Akibatnya Kesepakatan terhadap perlawanan Raden Inten hanya mampu

bertahan selama setahun. Lampung terus menerus mengalami kekacauan. Maka, pada tahun 1818 pemerintah Hindia Belanda kemudian memerintahkan penguasa sipil militer (*Civiele Militair Gezaghebber*) untuk menggantikan pemerintahan sipil (Imadudin 2016).

Sepeninggal Raden Inten I kedudukannya sebagai kepala marga digantikan oleh putranya yang bernama Raden Imba. Untuk memperkuat pertahanannya, Raden Imba mendirikan benteng di Raja Gepeh, sekitar gunung tanggamus. Tindakan pembangunan benteng oleh Raden Imba ini dianggap membahayakan bagi Belanda. Untuk itu, Belanda berusaha menghentikan usaha Raden Imba dengan mengirim kan satu kapal perang dan dua kapal perusak. Karena pasukan Belanda belum mampu mengimbangi kekuatan pasukan Raden Imba II, maka pada tahun 1832 di bawah pimpinan Hoffman dikirim lagi pasukan dengan 100 orang jumlah prajurit, dengan 1 kapal perang dan 3 kapal (Sayuti, Husin; Gunawan 2012).

Usaha mematahkan perlawanan Raden Imba diteruskan lagi oleh Belanda dengan mengirimkan ekspedisi baru di bawah Kapten Beelhouder dengan kekuatan 400 orang serdadu, ditambah dengan serdadu-serdadu berkulit hitam dari Afrika yang masih setengah liar. Ekspedisi ini dikalahkan oleh pasukan Raden Imba, bahkan Bellehouder sendiri tewas (Bukri et al. 1998).

Untuk menebus kekalahan yang dialami Belanda, Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi lanjutan di bawah Kolonel Elout pada tanggal 23 September 1834 dengan kekuatan 21 opsir dan 800 orang serdadu istimewa yang dengan beberapa meriam-meriam besar. Benteng Raja Gepeh berhasil direbut pada tanggal 24 Oktober 1834. Tetapi pimpinan perlawanan rakyat, Raden Imba beserta dua orang hulubalanganya berhasil meloloskan diri ke Lingga, dengan maksud mencari bantuan dari luar. Perlawanan Raden Imba diakhiri dengan ditangkapnya Raden Imba setelah sebelumnya berhasil meloloskan diri ke Lingga. Raden Imba akhirnya meninggal setelah diasingkan ke Pulau Timor (Bukri et al. 1998).

Perlawanan terhadap Belanda masih terus berlangsung, melalui estafet kepemimpinan dalam penguasa lokal di wilayah Lampung. Estafet perlawanan Terhadap Belanda,

kemudian dilanjutkan oleh anak dari Raden Imba bernama Raden Inten II. Pusat pemerintahan Radin Inten II berada di Kuripan, yakni wilayah selatan Lampung bagian selatan. Raden Inten II menguasai empat bandar, yaitu Bandar Penengahan, Bandar Legon, Bandar Pesisir/Ketibung, dan Bandar Rajabasa. Struktur Pemerintahan pada masa Raden Inten II membagi Tiap-tiap bandar dikepalai oleh kepala Bandar yang berpangkat *Pangeran*, kemudian dalam struktur tiap Bandar terbagi kedalam empat paksi yang dikepalai oleh seorang yang berpangkat *kriya* yang tugasnya selain menyelenggarakan pemerintahan sipil, juga mengambil bagian langsung dalam mempertahankan daerahnya. Setiap paksi dibagi lagi dalam empat *pekon* atau kampung yang dikepalai oleh seorang *Tumenggung* yang dalam bidang kemiliteran memegang jabatan prajurit. Setiap pekon tersebut masih dibagi lagi dalam kesatuan-kesatuan yang lebih kecil yang terdiri atas kepala keluarga yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Ngabehi* (Gonggong 1993).

Perlawanan dari rakyat Lampung benar-benar merepotkan Belanda, yang mengakibatkan pada tahun 1853 Asisten Residen J.E. Kohler menawarkan gencatan senjata. Gencatan tersebut hanya berlaku sebentar. Pada tahun 1855-1856 pertempuran sengit kembali berkobar. Perlawanan rakyat Lampung makin mendesak posisi Belanda di wilayah Lampung. Akibatnya, Asisten Residen J.E. Kohler meminta dpasukan tambahan untuk memperkuat kedudukannya. Atas permintaan tersebut, ekspedisi militer ke Lampung pada tanggal 10 Agustus 1856 dipimpin oleh Kolonel Waleson dengan membawa 9 kapal perang, 3 kapal pengangkut logistik, dan puluhan perahu mayang dan jung mendarat yang di Pulau Sikepal, Teluk Tanjung Tua (Bukri et al. 1998).

Setelah pengiriman ekspedisi militer oleh Belanda pertempuran sengit, tak mampu lagi dielakkan, basis pertahanan Raden Inten II di Benteng Bendulu mampu direbut Belanda. Benteng tersebut kemudian dijadikan sebagai basis operasi penghancuran benteng-benteng pertahanan Radin Inten II selanjutnya. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Steck menyerbu Benteng Rogoh yang berakhir berhasilnya pasukan Belanda dalam penyerbuan. Dalam penyerbuan tersebut, Haji Wakhia seorang *hulubalang* tertangkap, sedangkan putranya tewas dalam pertempuran.

Pada tanggal 9 September 1856, haji Wa' Maas yang juga sebagai *hulubalang* mengalami luka berat lalu gugur dalam pertempuran. Haji Wakhia yang kemudian ditawan dan dihukum mati. Jenazahnya dimakamkan di Kunyayan (Bukri et al. 1998)

Posisi Radin Inten II kian terpojok dengan tertangkapnya para pembantu utama dan kerabatnya. Benteng Ketimbang yang strategis kemudian dapat dikuasai oleh Belanda. Perlawanan Radin Inten II berakhir disebabkan oleh adanya pengkhianatan Radin Ngerapat yakni sepupu dari Radin Inten II. Radin Ngerapat mengundang Radin Inten II untuk berunding kepada Belanda di suatu daerah dekat Kunyian antara Tataan dan Gayam (Bukri et al. 1998). Dalam perundingan yang dilanjutkan dengan penyerapan tersebut Radin Inten II gugur pada pukul setengah dua belas malam tanggal 5 Oktober 1856 (Gonggong 1993).

c. Pengaruh terhadap aktivitas sosial-perekonomian masyarakat lampung akhir abad 19

1) Kondisi sosial Masyarakat Lampung

Pada penghujung abad ke-19 pada masa periode liberal, wilayah Lampung yang takluk mulai dibuka oleh pemerintah Belanda dengan pengelolaan arus modal asing untuk dapat mengolah kekayaan alam dan peluang mendapatkan keuntungan. Demi mendukung kegiatan tersebut, pemerintah tidak hanya membentuk regulasi, tapi juga terlibat aktif mengusahakan sarana yang memadai. Antara tahun 1816-1830 setelah masa VOC berakhir, pemerintah kolonial memberlakukan sistem sewa tanah (*landdelijk stelsel*). Sistem sewa tanah bertujuan menghilangkan kefeodalan dan menjunjung aspek kebebasan. Namun, sistem ini mengalami kegagalan dikarenakan terdapat kuatnya ikatan *jenang* atau kaum bangsawan dengan petani lada menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut. Tentu saja, para *jenang* ingin tetap berperan dalam mata rantai perdagangan lada (Imadudin 2016).

Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menambah permodalan ekonomi khususnya di wilayah Lampung, dengan memberikan keleluasaan modal asing untuk dapat diinvestasikan melalui usaha perkebunan pada tahun 1890. Untuk kali pertama, Perkebunan yang dibuka oleh Pemerintah Kolonial Belanda berada di *onderafdeling*

Telukbetung terutama karena alasan ekonomi yaitu dekat pelabuhan dan tidak terlalu jauh dengan pulau Jawa yang merupakan sumber tenaga kerja (Bukri et al. 1998). Kebijakan ekonomi lainnya yakni pendirian *De Lampongsche Bank* pada tahun 1912 sebagai salah satu upaya memperkuat kelangsungan kolonisasi dan perekonomian dari Jawa ke Lampung (Sudarno 2018).

Pada tahun 1860 yang merupakan periode selepas Perang Lampung jumlah penduduk di wilayah Keresidenan Lampung berjumlah 107.725 jiwa catatan tersebut tertuang dalam *Staat der Bevolking tan de bezzittingenbuiten Java en Madoera, 1860: 14-15* (Ariwibowo 2018). Para penduduk ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, serta beberapa sebagai nelayan baik di sungai maupun di sekitar pantai. Kehidupan masyarakat pada masa pertengahan abad ke-19 ini hanya terbatas di wilayah kota kota dagang dan pusat penanaman lada di wilayah Tulang Bawang dan Teluk Betung. Berikut ini adalah tabel popuasi penduduk Lampung pada tahun 1860-1900.

Tabel 1.

Tahun	Jumlah penduduk
1860	107.725
1882	142.000
1900	141.364

Sumber : *Staat der Bevolking tan de bezzittingenbuiten Java en Madoera, 1860: 14-15* (Ariwibowo 2018).

Dalam catatan lainnya mengenai penduduk lampung, sedikit memiliki perbedaan seperti catatan yang ditulis oleh Steck, F.G. pada tahun 1862. Yang berjudul *Topographische en Geograpische Beschrijvingder Lampongsche Distrikten* Deskripsi Topografis Wilayah Lampung, dalam tulisan tersebut Steck, F.G hanya mengambil populasi dari wilayah tertentu, yakni Teluk Betung, Seputih, Sekampung, Tulang Bawang, Dan Wilayah Semangka. Berikut ini tabel mengenai populasi penduduk Lampung menurut Steck. F.G

Dalam catatan lainnya mengenai penduduk lampung, sedikit memiliki perbedaan seperti catatan yang ditulis oleh Steck, F.G. pada tahun 1862. Yang berjudul *Topographische en Geograpische Beschrijvingder Lampongsche Distrikten* Deskripsi Topografis Wilayah Lampung, dalam tulisan tersebut Steck, F.G hanya mengambil populasi dari wilayah tertentu, yakni Teluk Betung, Seputih, Sekampung, Tulang Bawang, Dan Wilayah Semangka. Berikut ini tabel mengenai populasi penduduk Lampung menurut Steck. F.G

Tabel 2.

district	populasi
Teluk Betung	15.691
Seputih	7.404
Sekampung	17.936
Tulang Bawang	23.855
Semangka	9.879
Total	74.765

Sumber : (Steck 1862)

Dalam catatan Steck tersebut, total dari populasi Penduduk Lampung yang terbagi atas 5 wilayah adalah 74.765 jiwa, Steck menambahkan bahwa Statistik. Penduduk di wilayah Lampung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yakni kehidupan nomaden yang dijalani oleh Masyarakat Lampung dan adanya pemberlakuan *Hadat joedjur*(?), yang berarti masyarakat Lampung tidak bisa menikah tanpanya membayar mas kawin; akan tetapi, perlu juga dicatat bahwa pada wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, mengalami wabah penyakit, terutama kolera dan cacar (Steck 1862).

Sedangkan Veth, P.J dalam tulisannya yang berjudul *Schets van het Eiland Sumatra pada tahun 1867* mengenai Sketsa Pulau Sumatra, menuliskan jumlah penduduk pasca perang di beberapa wilayah sumatra khususnya Lampung, bahwa populasi penduduk Lampung berjumlah 91.968 Jiwa. Berikut ini merupakan tabel mengenai populasi penduduk Lampung menurut Veth P.J.

Tabel.3

Gov. Van sumatra weskust	europen	chinese	Amdeere vremde oosterlingen	inlanders	totaal
	1.386	2.973	1.304	865.090	870.753
Benkoloen	200	463	87	112.821	113.571
Lampongs	46	152	4.783	86.987	91.968
Palembangs	132	2.900	1.821	403.216	408.069
total	1.764	6.488	7.995	1.468.114	1.484.361

Sumber: (Veth 1867)

Mengenai jumlah populasi jumlah penduduk Lampung, Terdapat perbedaan mengenai jumlah populasi dari penduduk Lampung. Catatan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda *Centraal Bureau voor de Statistiek*, atau Biro Statistik untuk Kerajaan Belanda pada tahun 1892 dan 1898 menyebutkan angka bahwa, pada tahun 1892 penduduk Lampung berjumlah 130.677 jiwa, dan pada tahun 1895 berjumlah 137.501 jiwa (Centraal Bureau voor de Statistiek 1892, 1900).

2) Komoditas kopi dan Lada masa kolonial

Wilayah Lampung terkenal dengan hasil perkebunan seperti lada, damar, karet, dan gambir, kemudian masyarakatnya mulai membudidayakan tanaman kopi, sejak akhir pertengahan abad ke-19. Namun lada sebagai komoditas utama ekspor wilayah ini.

Penanaman lada menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan ekonomi yang diterapkan sejak sewa tanah hingga sistem Liberal (Kristian 2019). Perdagangan lada yang dimonopoli pada masa VOC kemudian mengalami kebangkrutan setelah VOC bubar, hingga pemerintah Hindia Belanda mengambil alih penguasaan lada di Lampung. Setelah bubarnya VOC kekuasaan Belanda di Lampung berpusat di Tulang Bawang, yakni pada masa tanam paksa (1830-1870), kebijakan yang berlaku ialah pemaksaan terhadap petani lada menjual lada kepada pemerintah melalui tangan kepala-kepala marga yang pada saat itu adalah perpanjangan tangan dari Belanda. Kondisi ini membuat kesejahteraan petani diabaikan (Imadudin 2016). Berikut catatan produksi lada di Sumatera tahun 1913 dalam satuan Kilogram.

Tabel.4

Wilayah	Lada putih	Lada hitam	Total
Lampung	428.000	11.537.000	11.965.000
Aceh	3.000	3.780.000	3.783.000
Palembang	358.000	1.759.000	2.177.000
Sumatera Timur	-	898.000	898.000
Riau	496.000	223.000	719.000
Bengkulu	87.000	427.000	514.000

Sumber: (Masroh 2015)

Pada tahun 1930 perkebunan lada mulai menurun, disebabkan karena penyakit kuning yang menyerang tanaman lada, selain itu juga kondisi tanah yang tidak subur karena kurangnya pupuk juga sebagai pemicu hilangnya tanaman lada yang kemudian dalam perkembangannya digantikan oleh tanaman perkebunan lain seperti kopi, timah, dan karet yang mulai ramai pada abad ke-19. Hal ini menyebabkan para

petani lada beralih untuk menanam kopi, karet, timah dan tanaman perkebunan lainnya (Masroh 2015).

Mengenai tanaman kopi, pemerintah Kolonial Belanda mulai memperkenalkan budidaya kopi di Lampung pada tahun 1841 setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian yang bersifat umum tentang kondisi daerah Lampung. Dalam hal ini, Para Mantri dari Jawa

didatangkan untuk memberikan pendidikan dalam bidang pertanian, terutama padi dan kopi bagi masyarakat Lampung (Huitema 1935). Memasuki masa Politik Etis, pembudidayaan kopi di daerah Sumatera hingga ke daerah Lampung, saat itu beriringan dengan proses kolonisasi (perpindahan penduduk) tahap pertama (berlangsung dari 1905 sampai 1911) di Lampung. Para kolonis asal Jawa dan kolonis keturunan Tionghoa diperintahkan untuk mulai membuka lahan dan mengembangkan tanaman kopi (Budiman 2012).

Namun, proses permulaan budidaya kopi tidak berlangsung mulus, populasi kopi sampai abad ke-20 sedikit ditemui. Kopi begitu diabaikan di masa lalu, namun sejak pembentukan regulasi yang kuat akhirnya pemerintah menyetujui untuk melakukan upaya penanaman kopi kembali yakni pada tahun 1957 dengan penanaman 408.398 pohon, kemudian meningkat menjadi 755.692 pada tahun 1958, dan terakhir menjadi 1.379.321 pohon pada 1959 (Veth 1863). Rendahnya

budidaya kopi di Lampung dikarenakan terdapat banyak faktor diantaranya, konstelasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, demografi yang rendah, dan infrastruktur masih tradisional. Akibatnya terjadi penurunan ekspor kopi di Lampung (Huitema 1935).

Berdasarkan laporan tahun 1858, bahwa kualitas ekspor kopi asal Lampung masih kalah dibanding kopi yang berasal dari Jawa dan Padang. Akan tetapi, pemerintah Belanda masih beranggapan bahwa produksi kopi di Lampung pasti akan meningkat, karena hasil ekspor tidak setara dengan konsumsi dalam negeri. Hal tersebut didasarkan atas laporan pada akhir Maret 1859, perkiraan tanaman kopi di Lampung berjumlah 1.379.321 pohon, di mana Veth menegaskan bahwa jika diantara 215.231 pohon tersebut berbuah, maka produksi tahun 1858 akan memperoleh hasil setidaknya 6.000 pikol, diperoleh dari 215.231 pohon berbuah, yaitu 1 pikol dari kurang dari 36 pohon (Veth 1863). Berikut ini adalah tabel perbandingan ekspor kopi di Sumatra bagian selatan (dalam ton).

Tabel 5.

Tahun	Lampung		Bengkulu		Palembang	
	R	P	R	P	R	P
1923	172	1.310	2.863	2.294	12.026	1.149
1924	293	757	5.920	2.811	19.881	1.679
1925	683	1.459	4.894	2.157	20.981	1.354
1926	1.116	899	6.621	2.641	25.364	1.480
1927	2.412	1.136	11.328	1.783	23.407	1.594
1928	3.808	988	15.885	1.713	28.229	1.257
1929	5.080	1.446	11.679	2.208	17.818	1.676

Sumber: (Kristian 2019)

E. Kesimpulan

Urgensi penguasaan hak atas daerah Lampung oleh Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya sebagai kepentingan ekonomi melainkan juga sebagai kepentingan politik. Hal tersebut dikarenakan letak strategis Lampung sebagai salah satu dari dua pintu gerbang utama ke Timur Jauh dari Samudera Hindia dan juga merupakan penghubung antar pulau perdagangan. Kemudian pada penghujung abad ke-19 pada masa periode liberal pasca takluknya perlawanan yang bersifat kedaerahan di Lampung, Pemerintah Belanda memulai sebuah kebijakan dengan membuka pengelolaan arus modal asing untuk dapat

mengolah kekayaan alam dan peluang mendapatkan keuntungan.

Sebagai wujud dari pelaksanaan politik etis adalah sebagai balas budi dan dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat pribumi, pemerintah Belanda kemudian mengupayakan keleluasaan modal asing untuk dapat diinvestasikan melalui usaha perkebunan pada tahun 1890 khususnya Lada dan Kopi. Namun pada fase selanjutnya komoditas Lada yang telah lama menjadi primadona di daerah Lampung, mengalami penurunan hasil. Hal tersebut, dikarenakan terdapat penyakit kuning yang menyerang tanaman lada, selain itu juga kondisi tanah yang tidak subur karena kurangnya pupuk juga sebagai pemicu hilangnya tanaman lada yang kemudian dalam perkembangannya

digantikan oleh tanaman perkebunan lain seperti kopi, timah, dan karet yang mulai ramai pada abad ke-19.

F. Daftar Pustaka

- Amboro, Kian. 2021. "Bendung Argoguruh 1935 Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Di Lampung." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5(1):100-110. doi: doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3470.
- Ariwibowo, Gregorius Andika. 2018. "Aktivitas Ekonomi Dan Perdagangan Di Karesidenan Lampung Pada Periode 1856 Hingga 1930." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 10(2):431. doi: 10.30959/patanjala.v10i2.361.
- Budianto, Aan. 2020. "Ketegangan Sosial Di Lampung Akibat Program Transmigrasi Di Era 1950an." *Jurnal Candi* 20(1):18-31.
- Budiman, Hary Ganjar. 2012. "Dinamika Industri Kopi Bubuk Di Lampung (1907-2011)." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4(3):526. doi: 10.30959/patanjala.v4i3.161.
- Bukri, Husin Sayuti, Soepangat, and Sukiji. 1998. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilal-Nilal Budaya Lampung.
- Centraal Bureau voor de Statistiek. 1892. *Jaarcijfers Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden Kolonien 1892*. s-Gravenhage: GEBR. BELINFANTE.
- Centraal Bureau voor de Statistiek. 1900. *Jaarcijfers Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden Kolonien 1898*. s-Gravenhage: GEBR. BELINFANTE.
- Gonggong, Anhar. 1993. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Lampung*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Halwi Dahlan, M. 2014. "Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuminggakari, Dan Transmigrasi Di Provinsi Lampung (1905-1979)." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 6(3):335. doi: 10.30959/patanjala.v6i3.164.
- Hisyam, M. 2012. *Sejarah Kesultanan Paksi Pak Sekala Brak*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Huitema, WK. 1935. *De Bevolkingskoffiecultuur Op Sumatra : Met Een Inleiding Tot Hare Geschiedenis Op Java En Sumatra*. Wageningen: Veenman & Zonen.
- Imadudin, Iim. 2016. "Perdagangan Lada Di Lampung." *Patanjala* 8(3):349-64. doi: 10.30959/patanjala.v8i3.14.
- Karsiwan. 2020. "Kejayaan Lada Hingga Praktek Perburuhan Di Lampung Abad Ke XVIII Hingga Abad XX." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 5(1):11. doi: 10.29300/tjksi.v5i1.2710.
- Van Der Kemp, P. H. 1899. "Raffles' Bezetting van de Lampongs in 1818." *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 50(1):1-58. doi: https://doi.org/10.1163/22134379-90000002.
- Kingston, Jeff. 1990. "Securing Sumatra's Pepper Periphery: Resistance and Pacification in Lampung during the 18th and 19th Centuries." *Southeast Asia: History and Culture* 19(19):77-104. doi: 10.5512/sea.1990.77.
- Kristian, Yuli. 2019. "Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Masroh, Laelatul. 2015. "Perkebunan Dan Perdagangan Lada Di Lampung." *Sejarah Dan Budaya* 9(1):64-78. doi: http://dx.doi.org/10.17977/sb.v9i1.4789.
- Rifqi, Yusuf; Muhammad Rizkillah; Fera Verianti Perdana; Hilman. 2020. *Tenggelamnya Mutiara Hitam Lampung: : Lada Ke Kopi Era Kolonial Tenggelamnya*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.

- Sayuti, Husin; Gunawan, Restu. 2012. "Indonesia Dalam Arus Sejarah." Pp. 458-65 in *Indonesia dalam Arus Sejarah*, edited by T. Abdullah. Jakarta: Ikhtisar Baru Van Houve.
- Steck, F. G. 1862. "Topographische En Geographische Beschrijving Der Lampongsche Distrikten, Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde." *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 8(1):68-112. doi: <https://doi.org/10.1163/22134379-90001028>.
- Sudarno. 2018. "The Colonization Trial Policy in Gedong Tataan, Lampung in 1905-1917." *Paramita - Historical Studies Journal* 28(1):1-12. doi: [10.15294/paramita.v28i1.10916](https://doi.org/10.15294/paramita.v28i1.10916).
- Veth, P. J. 1863. "Bewerkt Naar De Jongste En Beste Berigten: Tweede Deel R-Z."
- Veth, P. J. 1867. "Schets van Het Eiland Sumatra: Overdruk Uit Het Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie."
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor